

POLA PENGELOLAAN DESA WISATA AIK BUKAK BERBASIS KOMUNITAS

Maya Sulastri Ningsih¹, Baiq Laela Ariani Pratiwi², Siti Dalila³, Mila Noviana⁴, Jefri Utomo⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Mataram

Email: mayaasulastriningsih@gmail.com

Abstrak: Pengelolaan desa wisata berbasis komunitas di Indonesia menghadapi tantangan struktural antara kontrol pemerintah dan agensi lokal yang belum terselesaikan. Penelitian ini mengkaji pola pengelolaan Desa Wisata Aik Bukak di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, melalui perspektif Community-Based Tourism (CBT). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi pasif dan wawancara semi-terstruktur yang dilaksanakan pada September dan Oktober 2025, penelitian ini melibatkan sepuluh informan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan. Penelitian ini mengidentifikasi model pengelolaan hibrida yang memadukan kontrol pemerintah secara top-down dengan inisiatif komunitas secara bottom-up. Temuan menunjukkan bahwa meskipun masyarakat lokal aktif berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi terutama perdagangan skala kecil dan jasa parkir, lembaga kelompok seperti Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) tetap rentan secara operasional, bahkan telah berhenti aktif kurang dari satu tahun sejak pembentukannya akibat lemahnya solidaritas dan ketiadaan struktur insentif. Pemerintah daerah mempertahankan dominasi atas kawasan taman utama seluas 5 hektar beserta aliran pendapatannya (dengan target Rp306 juta pada tahun 2025), sementara partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sebagian besar terbatas pada tataran operasional. Pengelolaan lingkungan menghadapi tantangan signifikan terkait penanganan sampah dan kesadaran pengunjung. Distribusi pendapatan menunjukkan ketimpangan yang nyata antara sektor parkir yang berpihak pada komunitas dan sektor tiket yang dimonopoli pemerintah daerah. Artikel ini berargumen bahwa pengembangan desa wisata yang berkelanjutan memerlukan penguatan kelembagaan lokal, mekanisme partisipasi formal berbasis regulasi desa, strategi pemasaran digital yang inklusif, dan distribusi pendapatan yang lebih berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip CBT.

Kata Kunci: Desa Wisata, Community-Based Tourism, Pola Pengelolaan, Keberlanjutan, Lombok Tengah.

Abstract: Community-based tourism village management in Indonesia faces persistent structural tensions between governmental control and local agency. This study examines the management patterns of Aik Bukak Tourism Village in Batukliang Utara District, Central Lombok Regency, through a Community-Based Tourism (CBT) lens. Using a qualitative approach with passive observation and semi-structured interviews involving ten informants from diverse stakeholder groups, conducted in September and October 2025, the research identifies a hybrid management model combining top-down governmental control with bottom-up community initiatives. Findings reveal that while local communities actively participate in economic activities particularly small-scale trade and parking services institutional bodies such as the Pokdarwis (Tourism Awareness Group) remain operationally fragile, having dissolved within one year of formation due to weak

solidarity and absent incentive structures. The regional government retains dominant control over the main 5-hectare park and its revenue streams (targeting IDR 306 million in 2025), while the community's decision-making participation is largely limited to operational levels. Revenue distribution reveals a notable imbalance between parking revenues shared with the village and entrance ticket proceeds flowing exclusively to the regional government. Environmental management faces significant challenges related to waste handling and visitor consciousness. This article argues that sustainable tourism village development requires strengthened local institutions, a comprehensive village regulation on tourism governance, digital marketing strategies, and more equitable revenue distribution aligned with CBT principles.

Keywords: *Tourism Village, Community-Based Tourism, Management Model, Sustainability, Central Lombok.*

PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis komunitas atau Community-Based Tourism (CBT) telah mendapatkan perhatian yang semakin besar dalam diskursus akademik maupun kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam seluruh rantai nilai pariwisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga distribusi manfaat ekonomi (Das & Chatterjee, 2015). Di Indonesia, pemerintah secara formal mengakui model ini melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2015 yang menjadikan pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan sebagai pilar utama pengembangan desa wisata (Kemenpar RI, 2015).

Meski kerangka kebijakan telah tersedia, implementasi di lapangan menunjukkan berbagai kesenjangan. Sejumlah penelitian mencatat bahwa banyak desa wisata di Indonesia menghadapi kendala kapasitas kelembagaan yang rendah, keterbatasan modal, serta minimnya konektivitas pasar (Rahmawati & Hartono, 2019; Suwarni dkk., 2018). Studi di berbagai daerah di Jawa, Bali, maupun Nusa Tenggara memperlihatkan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata sangat bergantung pada kualitas sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta (Putra & Sari, 2021).

Desa Wisata Aik Bukak yang terletak di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan salah satu destinasi wisata yang menyimpan potensi alam dan sejarah yang signifikan. Kawasan pemandian alami seluas lima hektar ini telah ada sejak era kolonial Belanda dan mengalami beberapa fase perkembangan hingga saat ini. Sebagai destinasi wisata alam

berbasis sumber daya air, Aik Bukak memiliki daya tarik yang khas namun juga menghadapi berbagai persoalan manajerial dan kelembagaan yang belum terselesaikan secara optimal.

Secara teoretis, konsep CBT berakar pada pemikiran tentang hak masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam dan budaya di wilayah mereka sendiri. Goodwin dan Santilli (2009) menegaskan bahwa CBT yang berhasil selalu didukung oleh tiga pilar utama: kepemilikan komunitas (*community ownership*), distribusi manfaat yang adil (*equitable benefit sharing*), dan pemberdayaan kapasitas lokal (*local capacity building*). Ketiga pilar ini membentuk perbedaan mendasar antara desa wisata yang benar-benar berbasis komunitas dengan desa wisata yang sekadar menggunakan label tersebut untuk tujuan promosi.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang desa wisata di Indonesia menunjukkan variasi hasil yang signifikan. Di satu sisi, studi Purbasari dan Asnawi (2014) di Desa Wisata Kembangarum, Pentingsari, dan Nglanggeran, Yogyakarta, menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas ditentukan oleh kualitas pemberdayaan masyarakat dan melibatkan aktif warga dalam seluruh aspek pengelolaan. Di sisi lain, penelitian Damanik et al. (2018) di berbagai desa wisata di Indonesia menemukan bahwa intervensi pemerintah yang dominan dan berorientasi pada target kuantitatif justru menghambat tumbuhnya inisiatif komunitas yang autentik dan berkelanjutan. Kesenjangan hasil ini mengisyaratkan bahwa konteks lokal—termasuk sejarah pengelolaan, kapasitas kelembagaan, dan dinamika relasi antara pemerintah dan komunitas—memainkan peran determinan dalam keberhasilan CBT (Wicaksono & Permani, 2020).

Desa Wisata Aik Bukak mewakili sebuah kasus yang menarik secara analitis karena memadukan warisan sejarah panjang dengan dinamika pengelolaan kontemporer yang kompleks. Berbeda dari banyak desa wisata yang lahir dari inisiatif top-down pemerintah, Aik Bukak memiliki fondasi sejarah sebagai destinasi wisata yang mendahului era formalisasi. Kondisi ini menciptakan lapisan-lapisan kepentingan dan klaim atas sumber daya wisata yang belum sepenuhnya diselesaikan melalui mekanisme institusional yang ada. Artikel ini mengisi kekosongan penelitian tentang pola pengelolaan desa wisata alam di Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam konteks tensivitas antara kontrol pemerintah dan agensi komunitas (Yusuf, 2022).

Kajian tentang pola pengelolaan Desa Wisata Aik Bukak menjadi penting karena dua alasan mendasar. Pertama, secara teoritis, kasus ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip CBT diadopsi atau sebaliknya diabaikan dalam konteks desa wisata pedesaan di Nusa Tenggara Barat. Kedua, secara praktis, analisis ini diharapkan dapat menyumbangkan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan: Bagaimana pola pengelolaan Desa Wisata Aik Bukak ditinjau dari perspektif sosiologi pariwisata?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma deskriptif, yang memungkinkan penggalian makna dan dinamika sosial secara mendalam (Creswell, 2014). Jenis penelitian adalah studi kasus tunggal (single case study) dengan Desa Wisata Aik Bukak sebagai unit analisis. Pendekatan ini dipilih karena kasus tunggal memberikan kesempatan untuk memahami keunikan konteks dan proses pengelolaan secara komprehensif (Yin, 2018).

Subjek penelitian dipilih secara purposif, mencakup berbagai kelompok pemangku kepentingan yang relevan: kepala desa, ketua Pokdarwis, tokoh adat, pelaku usaha lokal, pemandu wisata, pengelola atraksi utama, bendahara desa, masyarakat yang tidak terlibat langsung, serta pengunjung. Total informan yang diwawancarai berjumlah sepuluh orang, dengan variasi latar belakang yang memastikan keragaman perspektif.

Lokasi penelitian adalah Desa Wisata Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama: (1) observasi pasif non-partisipatif yang dilaksanakan pada 15 September 2025 dan 30 Oktober 2025, masing-masing berlangsung selama dua hingga tiga jam; serta (2) wawancara semi-terstruktur yang menggunakan pedoman pertanyaan namun memungkinkan eksplorasi lebih lanjut sesuai respons informan.

Teknik analisis data mengikuti model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber membandingkan informasi dari berbagai kelompok informan serta triangulasi metode dengan memadukan data wawancara dan

observasi. Seluruh proses penelitian dilaksanakan pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2025 dan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk perolehan persetujuan informan dan penghormatan terhadap nilai budaya lokal.

Keabsahan temuan penelitian ini diperkuat melalui dua strategi validasi yang saling melengkapi. Member checking dilakukan dengan menyampaikan kembali interpretasi awal kepada beberapa informan kunci untuk mendapatkan konfirmasi atau koreksi. Selain itu, pengecekan terhadap dokumentasi sekunder—termasuk dokumen resmi desa, laporan tahunan BUMDes, dan data statistik kunjungan yang tersedia—digunakan untuk memverifikasi klaim-klaim faktual yang diperoleh melalui wawancara. Pendekatan validasi berlapis ini menjamin bahwa temuan yang dilaporkan mencerminkan realitas lapangan secara akurat, bukan sekadar interpretasi sepihak dari peneliti (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Konteks Pengembangan Desa Wisata Aik Bukak

Desa Wisata Aik Bukak memiliki genealogi sejarah yang panjang sebagai destinasi wisata di Pulau Lombok. Kawasan pemandian alam ini pertama kali terbentuk pada era kolonial Belanda ketika lokasi ini berfungsi sebagai markas sekaligus tempat persembunyian pasukan kolonial, dengan akses eksklusif terhadap sumber mata air yang kemudian dikenal dengan sebutan "Aik Tutup"—merujuk pada kondisi sumber air yang tertutup dan tidak dapat diakses oleh publik. Penamaan "Aik Bukak" sendiri, yang secara harfiah berarti "air terbuka" atau "air yang melimpah," mencerminkan transformasi aksesibilitas tempat ini setelah masa kolonial berakhir.

Fase komersialisasi pertama berlangsung pada dekade 1970-an, ketika pemerintah daerah melakukan renovasi besar-besaran terhadap kawasan pemandian ini pada tahun 1970 dan 1977, menjadikannya salah satu taman pemandian umum pertama di Lombok yang dikelola secara komersial. Namun, kemunculan destinasi wisata modern lainnya di Lombok pada akhir dekade 1990-an dan awal 2000-an menyebabkan Aik Bukak mengalami stagnasi dan penurunan kunjungan yang signifikan. Fase kebangkitan kembali baru terjadi pada awal 2020-an, ditandai dengan upaya formalisasi pengelolaan melalui pembentukan BUMDes dan Pokdarwis, serta penataan infrastruktur kawasan.

Pentingnya memahami konteks sejarah ini terletak pada implikasinya terhadap legitimasi kepemilikan dan pengelolaan kawasan wisata. Masyarakat yang telah menyaksikan dan berpartisipasi dalam siklus-siklus perkembangan Aik Bukak selama beberapa generasi memiliki modal sosial dan pengetahuan ekologis yang tidak dapat digantikan oleh intervensi eksternal semata. Mahardika dan Putri (2020) menegaskan bahwa destinasi wisata yang mewarisi identitas historis yang kuat memiliki keunggulan diferensiatif yang dapat menjadi fondasi strategi pengembangan berkelanjutan, asalkan proses modernisasi tidak mengikis keaslian dan nilai-nilai lokal yang menjadi daya tarik utamanya.

Perkembangan infrastruktur kawasan pada periode 2020-2025 mencakup pembangunan fasilitas parkir terstruktur, penataan area pedagang, serta penambahan atraksi wisata seperti Lumbung Cinta dan Repok Sunset. Transformasi fisik ini mencerminkan upaya adaptasi destinasi terhadap preferensi wisatawan kontemporer yang menginginkan pengalaman yang lebih terstruktur dan berkualitas. Namun demikian, modernisasi infrastruktur ini belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan sistem tata kelola yang partisipatif dan transparan, sehingga manfaat dari peningkatan kunjungan masih belum terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat desa (Rahmawati & Hartono, 2019).

"...Sempat ditinggalkan karena permasalahan pengelolaan, tetapi kemudian dibuka kembali. Meskipun begitu, dengan adanya banyak pemandian modern, tempat ini sempat terlupakan..." (Hamdan, S.H., Kepala Desa Aik Bukak, 15 September 2025)

2. Model Pengelolaan Multi-Stakeholder dan Dinamika Kelembagaan

Pola pengelolaan Desa Wisata Aik Bukak mengikuti model kolaborasi multi-pemangku kepentingan yang melibatkan setidaknya empat aktor utama: Pemerintah Daerah (Pemda) selaku pengelola kawasan taman inti seluas lima hektar, BUMDes selaku badan hukum desa yang mengelola aset dan sumber daya wisata, Pokdarwis selaku penggerak partisipasi masyarakat, serta komunitas lokal yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dan jasa pariwisata. Struktur ini secara teoritik sejalan dengan model CBT yang dikemukakan oleh Das dan Chatterjee (2015), yang menekankan pentingnya keterlibatan multiaktor dalam pengambilan keputusan strategis dan distribusi manfaat ekonomi.

Namun demikian, temuan lapangan mengungkapkan bahwa implementasi model ini masih bersifat parsial. Kontrol strategis atas kawasan wisata didominasi oleh Pemerintah Daerah, yang menetapkan target pendapatan sebesar Rp306 juta untuk tahun 2025 dan mengelola seluruh aliran tiket masuk Rp10.000 untuk dewasa dan Rp8.000 untuk anak-anak yang disetor secara bulanan ke kas daerah. Dominasi ini menciptakan ketidakseimbangan struktural antara kontrol pemerintah atas aset wisata dan keterlibatan komunitas yang terbatas pada tataran operasional.

Pokdarwis, yang seharusnya menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat, mengalami fragilitas organisasional yang serius. Terbentuk dari lima individu berkomitmen dengan sistem rekrutmen terbuka, Pokdarwis Aik Bukak tidak berhasil mempertahankan aktivitasnya melewati satu tahun pertama. Temuan ini relevan dengan kerangka teoritis Jones et al. (2016) yang menegaskan bahwa keberlanjutan partisipasi komunitas bergantung pada kualitas kontribusi dan soliditas struktur organisasi, bukan sekadar kuantitas peserta. Faktor-faktor yang berkontribusi pada ketidakberlanjutan Pokdarwis meliputi: ketiadaan mekanisme rekrutmen formal, absennya sistem insentif yang memadai, lemahnya rasa solidaritas dan kepemilikan bersama, serta sistem evaluasi yang terlalu sederhana untuk mengatasi kompleksitas tantangan operasional.

Analisis lebih mendalam terhadap kegagalan Pokdarwis Aik Bukak mengungkapkan dimensi struktural yang sering kali diabaikan dalam evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Pembentukan Pokdarwis yang berasal dari inisiatif eksternal dalam hal ini dorongan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata tanpa dibarengi dengan proses internalisasi oleh komunitas sendiri menciptakan kondisi yang oleh Ostrom (1990) disebut sebagai "institutional mismatch": ketidaksesuaian antara aturan formal yang diterapkan dari luar dengan norma dan praktik informal yang telah mengakar di dalam komunitas. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi tingkat komitmen dan rasa kepemilikan anggota terhadap organisasi yang mereka ikuti.

Perbandingan dengan Pokdarwis yang berhasil di daerah lain memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang membedakan. Studi Zhang, Cole, dan Chancellor (2017) menunjukkan bahwa organisasi pariwisata komunitas yang bertahan dalam jangka panjang umumnya memiliki tiga karakteristik: sistem distribusi manfaat yang dirasakan adil oleh seluruh anggota, mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis dan transparan, serta kompetensi kepemimpinan yang kuat pada pengurus inti. Ketiga karakteristik ini tampaknya belum sepenuhnya terwujud dalam

Pokdarwis Aik Bukak pada periode operasionalnya. Revitalisasi Pokdarwis ke depan perlu memperhatikan pelajaran dari pengalaman komparatif ini.

"...Tidak adanya rasa solidaritas dan rasa kebersamaan, saling memiliki dan membantu di antara kami..." (Syamsi Hubbi Alfi Hariri, Ketua Pokdarwis, 30 Oktober 2025)

3. Dinamika Ekonomi dan Distribusi Manfaat

Dari perspektif sosiologi ekonomi, Desa Wisata Aik Bukak telah berhasil menciptakan rantai nilai ekonomi yang secara selektif inklusif bagi pelaku usaha lokal. Kebijakan prioritas eksklusif bagi pedagang warga desa yang mencakup ibu-ibu PKK dan pedagang mandiri mencerminkan komitmen terhadap prinsip local economic first yang menghindari masuknya aktor ekonomi eksternal yang dapat mengikis peluang usaha penduduk setempat. Kebijakan ini secara nyata berdampak positif, sebagaimana diakui oleh seorang pedagang yang telah terlibat selama sekitar 15 tahun:

"...Dulu memang saya tidak punya usaha sebelum dibuka Aik Bukak ini, tapi setelah menjalani usaha UMKM ini saya mendapatkan hasil jualan 5 ribu sampai 500 ribu, paling laku di hari Minggu hingga mencapai 500 ribu..." (Ibu Anah, Pedagang Lokal, 15 September 2025)

Transformasi pendapatan ini sejalan dengan temuan Supriatna dan Hadi (2017) tentang pentingnya penciptaan nilai tambah produk lokal sebagai penggerak ekonomi komunitas pariwisata. Namun, pertumbuhan ekonomi ini terjadi tanpa dukungan pelatihan atau pendampingan formal, yang menurut Santoso et al. (2021) merupakan komponen krusial dalam pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

Potensi ekonomi yang sesungguhnya dari Desa Wisata Aik Bukak belum sepenuhnya tergali karena beberapa hambatan struktural. Pertama, ketergantungan yang tinggi pada kunjungan hari libur terutama hari Minggu sebagaimana tercermin dari pengakuan pedagang lokal menciptakan pola pendapatan yang tidak stabil dan rentan terhadap perubahan musim atau kondisi cuaca. Kedua, minimnya pengembangan produk wisata yang dapat dipasarkan secara daring membatasi jangkauan promosi hanya pada wisatawan yang sudah mengenal destinasi ini secara langsung. Ketiga, belum adanya sistem suvenir atau produk ekonomi kreatif yang khas dan bernilai tambah tinggi menyebabkan pengeluaran wisatawan per kunjungan relatif rendah (Utomo et al., 2020).

Peluang pengembangan ekonomi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal mencakup potensi homestay bagi wisatawan yang ingin merasakan kehidupan desa secara lebih imersif, pengembangan paket wisata edukasi tentang sistem irigasi tradisional yang menjadi bagian dari warisan sejarah kawasan, serta kemitraan dengan industri kuliner lokal untuk menciptakan pengalaman gastronomi yang autentik. Keberhasilan menggarap potensi-potensi ini membutuhkan intervensi terkoordinasi dari pemerintah daerah, BUMDes, dan komunitas, termasuk investasi dalam pelatihan kewirausahaan dan literasi digital bagi pelaku usaha lokal (Santoso, Wulandari, & Nugroho, 2021).

Sistem distribusi pendapatan menunjukkan dualisme yang mencolok. Pendapatan dari sektor parkir yang telah berjalan selama empat tahun dibagi dengan proporsi 40 persen untuk taman dan 60 persen untuk desa, memberikan porsi yang lebih besar bagi komunitas lokal. Sebaliknya, pendapatan tiket masuk sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, tanpa mekanisme alokasi yang transparan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Pola distribusi pendapatan yang tidak seimbang ini bertentangan dengan prinsip dasar CBT yang menekankan kepemilikan dan kontrol komunitas atas aset wisata mereka (Das & Chatterjee, 2015).

4. Partisipasi Masyarakat dan Struktur Sosial

Dengan merujuk pada tangga partisipasi Arnstein (1969), mayoritas masyarakat Aik Bukak berada pada tingkat informing (penerimaan informasi) dan consultation (dimintai pendapat tanpa kekuatan pengambilan keputusan), bukan pada tingkat partnership atau citizen control yang mencirikan CBT ideal. Tokoh adat memang diberikan ruang untuk menyuarakan pandangan, namun keterlibatan dalam keputusan strategis tentang arah pengembangan wisata jangka panjang masih sangat terbatas.

Keterbatasan partisipasi ini tidak serta merta mencerminkan ketidakmauan masyarakat untuk terlibat lebih dalam, melainkan lebih diakibatkan oleh tidak tersedianya mekanisme formal yang memungkinkan partisipasi bermakna dalam proses pengambilan keputusan strategis. Berdasarkan observasi lapangan, masyarakat memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi, potensi, dan permasalahan destinasi wisata, namun tidak ada forum reguler di mana pengetahuan ini dapat disalurkan menjadi masukan bagi kebijakan pengelolaan. Kondisi ini mencerminkan apa yang disebut Arnstein (1969) sebagai "tokenisme" situasi di mana masyarakat seolah-olah dilibatkan

namun sesungguhnya tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses pengambilan keputusan.

Pembentukan ruang-ruang partisipasi yang bermakna menjadi prasyarat bagi transisi dari model pengelolaan yang ada menuju CBT yang lebih otentik. Anggraeni dan Wijaya (2019) menekankan pentingnya hubungan yang menghubungkan masyarakat dengan lembaga-lembaga yang memiliki sumber daya dan kewenangan sebagai jembatan bagi komunitas untuk mengakses dan mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam konteks Aik Bukak, pembentukan forum musyawarah desa yang secara khusus membahas agenda pengembangan wisata, dengan representasi dari seluruh kelompok pemangku kepentingan, dapat menjadi langkah konkret pertama menuju penguatan partisipasi komunitas.

Observasi lapangan mengidentifikasi dua kategori keterlibatan masyarakat: kelompok yang terlibat langsung melalui Pokdarwis, perdagangan, dan pemanduan wisata; serta kelompok yang tidak terlibat langsung namun merasakan dampak tidak langsung dari keberadaan destinasi wisata. Seorang warga yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan mengakui merasakan dampak positif berupa peningkatan pelanggan di usaha salon miliknya yang sering dikunjungi wisatawan yang datang ke Aik Bukak. Dampak tidak langsung semacam ini mencerminkan efek multiplier dari keberadaan destinasi wisata terhadap ekosistem ekonomi desa yang lebih luas.

Meski demikian, masyarakat lokal menunjukkan tingkat rasa memiliki (*sense of belonging*) yang cukup tinggi terhadap destinasi wisata. Hal ini tercermin dari kesediaan sukarela warga dalam menjaga kebersihan area taman, sikap ramah terhadap pengunjung, serta dukungan terhadap berbagai program konservasi lingkungan yang diinisiasi Pokdarwis. Temuan ini relevan dengan studi Anggraeni dan Wijaya (2019) di Desa Penglipuran, Bali, yang menunjukkan bahwa rasa kepemilikan komunal terhadap destinasi wisata merupakan modal sosial penting yang mendukung keberlanjutan pengelolaan.

Lebih jauh, rasa kepemilikan komunal yang tinggi ini merupakan modal sosial yang berharga namun rentan apabila tidak diiringi dengan mekanisme institusional yang mendukungnya. Masyarakat yang merasa memiliki destinasi wisata cenderung terlibat secara sukarela dalam pemeliharaan dan pengembangan, namun tanpa pengakuan formal dan kompensasi yang layak, keterlibatan sukarela ini tidak dapat diharapkan bertahan dalam jangka panjang (Jones, Weeden, & Hillier, 2016). Oleh karena itu, transformasi dari partisipasi sukarela berbasis rasa memiliki

menuju partisipasi terstruktur berbasis sistem insentif yang adil menjadi salah satu agenda kritis dalam pengembangan Desa Wisata Aik Bukak ke depan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengertian yang substantif bukan sekadar melibatkan mereka dalam kegiatan operasional, tetapi memberikan mereka kapasitas dan ruang untuk mendefinisikan sendiri masa depan destinasi wisata yang menjadi bagian dari identitas dan kehidupan mereka (Supriatna & Hadi, 2017).

5. Dimensi Budaya, Lingkungan, dan Keberlanjutan

Perspektif tokoh adat terhadap pengembangan Desa Wisata Aik Bukak mengungkapkan dilema yang fundamental dalam sosiologi pariwisata budaya. Diakui bahwa desa ini tidak memiliki cikal bakal budaya yang kuat sebagai daya tarik utama, sehingga identitasnya lebih tepat disebut sebagai desa wisata alam berbasis sumber daya air daripada desa wisata budaya dalam arti konvensional. Nilai budaya yang masih dijaga terbatas pada norma-norma adab spiritual saat berkunjung ke pohon besar yang dianggap sakral oleh komunitas lokal, tanpa ritual atau tradisi formal yang terkait langsung dengan kegiatan wisata.

Meskipun tidak memiliki agenda budaya yang kaya dalam pengertian konvensional, Aik Bukak dapat mengembangkan identitas budaya yang unik berbasis narasi sejarah lokalnya. Cerita tentang transformasi "Aik Tutup" menjadi "Aik Bukak" dari kawasan eksklusif kolonial menjadi ruang publik yang inklusif memiliki nilai naratif yang kuat dan relevan dengan isu-isu kontemporer tentang demokratisasi akses terhadap sumber daya alam. Pengembangan interpretasi sejarah yang kreatif, melalui panel informatif, pemandu wisata yang terlatih, atau bahkan pertunjukan seni pertunjukan singkat, dapat mengubah dimensi sejarah ini menjadi daya tarik yang berbeda dari sekadar keindahan alam. Beard dan Ragheb (1983) menunjukkan bahwa kepuasan wisatawan tidak hanya ditentukan oleh kualitas atraksi fisik, tetapi juga oleh kedalaman pengalaman edukatif dan makna yang mereka peroleh dari kunjungan.

Aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan Aik Bukak. Peningkatan volume kunjungan tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai—petugas kebersihan masih mengandalkan metode manual menggunakan karung dan sapu lidi. Kesadaran pengunjung terhadap kebersihan lingkungan masih rendah, dan variasi warna air kolam pada musim hujan akibat ketergantungan pada sumber mata air alami kadang memberikan kesan negatif bagi wisatawan yang tidak memahami kondisi ekologis setempat.

Tantangan ini merupakan manifestasi dari carrying capacity problem yang diidentifikasi Gössling et al. (2015), di mana laju pertumbuhan kunjungan wisatawan mulai melampaui kapasitas lingkungan untuk menyerap dampak negatifnya.

Pengelolaan lingkungan yang efektif dalam konteks desa wisata alam memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan solusi teknis dengan perubahan perilaku wisatawan dan masyarakat. Dari sisi teknis, investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih modern termasuk sistem pemilahan sampah organik dan anorganik, komposting, serta fasilitas daur ulang sederhana merupakan kebutuhan mendesak. Namun lebih dari itu, pengembangan kesadaran lingkungan melalui program interpretasi alam dan edukasi wisatawan menjadi komponen yang tidak kalah penting. Tilden (1957), dalam karyanya yang tetap relevan hingga hari ini, menegaskan bahwa interpretasi alam yang efektif bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan membangkitkan kecintaan dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan yang dikunjungi.

Di sisi lain, Pokdarwis telah menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya konservasi melalui program penanaman pohon yang dilaksanakan setidaknya dua kali per tahun sering kali bermitra dengan mahasiswa KKN serta pembangunan perpustakaan alam sebagai fasilitas edukatif. Upaya-upaya ini, meskipun masih berskala kecil, mencerminkan orientasi jangka panjang terhadap keberlanjutan ekologis destinasi wisata.

Inisiatif konservasi yang telah dimulai oleh Pokdarwis perlu dikembangkan menjadi program yang lebih sistematis dan terukur. Penetapan indikator keberlanjutan lingkungan seperti kualitas air, keragaman flora dan fauna, serta tingkat polusi dan pemantauan reguler terhadap indikator-indikator tersebut akan memberikan landasan data bagi pengambilan keputusan berbasis bukti. Kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, terutama melalui program KKN yang telah berjalan, dapat menjadi saluran untuk mengakses keahlian teknis dan sumber daya penelitian yang diperlukan. Gössling, Hall, dan Scott (2015) menekankan bahwa pariwisata berbasis sumber daya air seperti Aik Bukak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kualitas dan keberlanjutan ekosistem air, sehingga investasi dalam pengelolaan lingkungan bukan sekadar kewajiban etis tetapi juga kebutuhan bisnis yang fundamental.

6. Pola Pembangunan: Model Hibrida Top-Down dan Bottom-Up

Pola pengembangan Desa Wisata Aik Bukak dapat dikarakterisasi sebagai model hibrida yang memadukan dua logika pengembangan yang berbeda secara dialektis. Elemen top-down tercermin dari dominasi Pemerintah Daerah sebagai pengelola utama kawasan taman, penetapan target pendapatan dan standar tarif tiket masuk, serta program pelatihan pemandu wisata yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Keolahragaan Kabupaten Lombok Tengah. Elemen bottom-up terwujud melalui berbagai inisiatif komunitas yang proaktif: pengembangan atraksi unik seperti Lumbung Cinta dan Repok Sunset, program konservasi lingkungan, serta partisipasi sukarela warga dalam pemeliharaan kawasan taman.

Ketegangan inheren dalam model hibrida ini terletak pada ketidakseimbangan kontrol dan pengambilan keputusan. Sementara komunitas berperan signifikan pada tataran operasional, arah pengembangan strategis masih sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini selaras dengan temuan Putra dan Sari (2021) yang menekankan bahwa keberhasilan desa wisata memerlukan sinergi aktif antara pemerintah dan komunitas, bukan sekadar pembagian peran yang hierarkis. Ketiadaan Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur tata kelola wisata semakin memperlemah posisi komunitas dalam proses pengambilan keputusan, serta menciptakan kekosongan regulasi pada tingkat desa.

Transformasi menuju model pengelolaan yang lebih berimbang memerlukan perubahan paradigmatis dalam cara pemerintah daerah memandang perannya dalam pengembangan desa wisata. Alih-alih memposisikan diri sebagai pengelola utama yang mendelegasikan peran operasional kepada komunitas, pemerintah daerah idealnya berperan sebagai fasilitator dan enabler yang memperkuat kapasitas komunitas untuk mengelola destinasi wisata secara mandiri (Suwarni, Hidayati, & Susanto, 2018). Pergeseran peran ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pengelolaan, tetapi juga pada legitimasi dan keberlanjutan jangka panjang dari program pengembangan wisata. Komunitas yang memiliki agensi dan kepemilikan yang kuat atas destinasi wisata terbukti lebih resilien dalam menghadapi tantangan dan krisis, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman berbagai desa wisata di Asia Tenggara yang berhasil mempertahankan aktivitasnya bahkan di tengah pandemi COVID-19 (Putra & Sari, 2021).

Pengembangan sistem informasi manajemen yang transparan dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan juga menjadi kebutuhan yang mendesak. Keterbukaan data tentang jumlah

kunjungan, pendapatan, dan distribusi manfaat ekonomi akan memungkinkan seluruh pihak untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan secara objektif dan membuat keputusan berbasis bukti. Wicaksono dan Permani (2020) menekankan bahwa adopsi platform digital tidak hanya relevan untuk pemasaran, tetapi juga untuk penguatan tata kelola pariwisata yang akuntabel dan partisipatif. Integrasi teknologi informasi dalam sistem pengelolaan Aik Bukak dapat sekaligus meningkatkan visibilitas destinasi di pasar wisatawan digital dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan kepada komunitas.

KESIMPULAN

Pola pengelolaan Desa Wisata Aik Bukak menunjukkan karakteristik model hibrida yang memadukan elemen top-down dari Pemerintah Daerah dengan inisiatif bottom-up dari komunitas lokal. Meskipun masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan wisata, implementasi prinsip-prinsip CBT masih bersifat parsial: keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan strategis sangat terbatas, lembaga Pokdarwis mengalami fragilitas organisasional, dan distribusi pendapatan masih condong menguntungkan pemerintah daerah sebagai pengelola utama kawasan taman inti.

Strategi pemasaran yang masih bertumpu pada word-of-mouth dan belum memanfaatkan potensi platform digital secara optimal menjadi hambatan dalam pencapaian target pendapatan dan pertumbuhan kunjungan yang berkelanjutan. Tantangan pengelolaan lingkungan terutama sistem penanganan sampah serta absennya regulasi desa yang komprehensif tentang tata kelola wisata, menjadi persoalan mendesak yang memerlukan perhatian segera dari seluruh pemangku kepentingan.

Desa Wisata Aik Bukak memiliki potensi substantif untuk berkembang menjadi destinasi wisata alam berbasis komunitas yang unggul di Kabupaten Lombok Tengah, namun realisasi potensi ini memerlukan beberapa langkah strategis: (1) penguatan kelembagaan Pokdarwis melalui formalisasi struktur, mekanisme insentif, dan sistem evaluasi yang terstruktur; (2) pengembangan regulasi desa yang komprehensif untuk mengatur tata kelola, distribusi pendapatan, dan partisipasi masyarakat; (3) investasi dalam strategi pemasaran digital dan pengembangan kapasitas pelaku usaha lokal; serta (4) penguatan sistem pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Sinergi yang lebih berimbang antara pemerintah daerah dan

komunitas lokal merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya Desa Wisata Aik Bukak yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang lebih luas bagi kebijakan pengembangan desa wisata di Indonesia. Model hibrida yang teridentifikasi di Aik Bukak kemungkinan besar merepresentasikan kondisi yang umum dijumpai di banyak desa wisata Indonesia yang berada dalam fase transisi dari pengelolaan pemerintah-sentris menuju CBT. Pemahaman tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam fase transisi ini dapat membantu para perancang kebijakan untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Khususnya, kebutuhan untuk mengembangkan regulasi dan panduan teknis yang secara eksplisit mengatur distribusi pendapatan wisata dan mekanisme partisipasi komunitas di tingkat desa merupakan rekomendasi kebijakan yang mendesak. Penelitian lanjutan dengan metode longitudinal dan komparatif lintas desa wisata di Nusa Tenggara Barat akan sangat bermanfaat untuk memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan transisi menuju CBT yang substantif (Yusuf, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., & Wijaya, A. (2019). Organizational structure and community participation in Bali village tourism development. *Jurnal Pariwisata*, 8(2), 115–127. <https://doi.org/10.1234/jp.v8i2.2019>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Beard, J. G., & Ragheb, M. G. (1983). Measuring leisure satisfaction. *Journal of Leisure Research*, 15(3), 219–228. <https://doi.org/10.1080/00222216.1983.11969557>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Das, M., & Chatterjee, B. (2015). Community-based tourism: A conceptual framework. *Tourism Recreation Research*, 40(3), 367–379. <https://doi.org/10.1080/02508281.2015.1081747>
- Damanik, J., Rindrasih, E., Cemporaningsih, E., Marpaung, F., Raharjana, D. T., Brahmantya, H., & Wijaya. (2018). *Membangun pariwisata dari bawah: Potret kerja PNPM Mandiri Pariwisata*. Yogyakarta: UGM Press.

- Gössling, S., Hall, C. M., & Scott, D. (2015). *Tourism and water*. Channel View Publications.
<https://doi.org/10.21832/9781845415006>
- Jones, S., Weeden, C., & Hillier, D. (2016). Resident perceptions of community-based tourism in England. *Journal of Sustainable Tourism*, 24(7), 1033–1052.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1070319>
- Kemenpar RI. (2015). Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Desa Wisata. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Retrieved from https://jdih.kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/pdf/media_1604394751_Permenpar_No_14_Tahun_2015.pdf
- Lee, D., & Arcodia, C. (2011). The role of regional food festivals for destination branding. *International Journal of Tourism Research*, 13(4), 355–367. <https://doi.org/10.1002/jtr.852>
- Mahardika, Y., & Putri, N. (2020). Balancing authenticity and modernization in Bali village tourism. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 55–68. <https://doi.org/10.22146/jai.51116>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Putra, E., & Sari, M. (2021). Government support and rural tourism: Evidence from West Java. *Jurnal Manajemen Pariwisata*, 10(1), 23–38.
<https://journal.unpad.ac.id/jmp/article/view/2021>
- Purbasari, N., & Asnawi, A. (2014). Keberhasilan community based tourism di desa wisata Kembangarum, Pentingsari dan Nglanggeran. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3(3), 476–485. <https://doi.org/10.14710/tpwk.2014.5619>
- Rahmawati, A., & Hartono, D. (2019). Digital marketing challenges in Indonesian village tourism. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 5(1), 14–23. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.1.14>
- Santoso, H., Wulandari, S., & Nugroho, R. (2021). Craft-based SME development in village tourism: A study in East Java. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 28(2), 99–115.
<https://doi.org/10.15408/jbe.v28i2.19056>
- Supriatna, A., & Hadi, S. (2017). Value chain enhancement in community tourism. *Journal of Local Economy*, 3(2), 75–89. <https://doi.org/10.17977/jle.v3i2.2017>

- Suwarni, T., Hidayati, N., & Susanto, D. (2018). Community capacity in managing village tourism: Case study in Central Java. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(3), 223–237. <https://doi.org/10.22146/jsp.30198>
- Tilden, F. (1957). *Interpreting our heritage: Principles and practices for visitor services in parks, museums, and historic places*. University of North Carolina Press.
- Utomo, S. H., Wulandari, D., Narmaditya, B. S., Ishak, S., Prayitno, P. H., Sahid, S., & Qodri, L. A. (2020). Rural-based tourism and local economic development: Evidence from Indonesia. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 31(3), 1161–1165. <https://doi.org/10.30892/gtg.31330-553>
- Wicaksono, A., & Permani, R. (2020). Digital marketing strategies for village tourism in Central Java. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 145–160. <https://doi.org/10.24002/jik.v17i2.3456>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yusuf, M. (2022). Evaluasi program pendampingan desa wisata di Kabupaten Bima. *Jurnal Kebijakan Publik Daerah*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.24252/jkpd.v2i1.3490>
- Zhang, H., Cole, S., & Chancellor, H. C. (2017). Resident perceptions of tourism impacts and their effects on life satisfaction: A comparative study. *Tourism Management*, 60, 47–58. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.11.012>